2024

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KPP PRATAMA GIANYAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan kinerja (LAKIN) merupakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan tahun 2024, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang penyusunan laporan kinerja tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar disusun berdasarkan data capaian kinerja organisasi yang didalamnya memuat indikator kinerja organisasi.

Indikator kinerja KPP Pratama Gianyar memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar mengidentifikasi terdapat beberapa permasalahan, diantaranya.

1. Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan dan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target;
2. Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target;
3. Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai; dan
4. Hasil survei kepuasan layanan di bawah target yang ditetapkan.

Terhadap empat permasalahan utama yang dihadapi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar telah melaksanakan mitigasi risiko guna mengurangi potensi tidak tercapainya target kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk evaluasi atas rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memitigasi risiko yang dihadapi sehingga target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

I.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar (selanjutnya disingkat KPP Pratama Gianyar) adalah salah satu Unit Organisasi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah

DJP Bali yang berkedudukan di Denpasar, dimana tugas - tugas KPP Pratama Gianyar adalah melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan & Konsultasi Pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan kepatuhan WP dan Law Enforcement di samping pengadministrasian data perpajakan di Wilayah KPP Pratama Gianyar. Wilayah kerja KPP Pratama Gianyar adalah Kabupaten Gianyar yang terdiri dari 7 kecamatan, Kabupaten Klungkung yang terdiri dari 4 kecamatan, Kabupaten Bangli yang terdiri dari 4 kecamatan, dan Kabupaten Karangasem yang terdiri dari 8 Kecamatan.

KPP Pratama Gianyar terdiri atas 1 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 9 Seksi dan 2 Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak serta 2 KP2KP. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Gianyar terdiri atas 1 Kepala Kantor Pelayanan, 1 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 9 Seksi (termasuk 6 Seksi Pengawasan), dan 2 Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak. Adapun bagan struktur organisasi KPP Pratama Gianyar adalah sebagai berikut.

Gambar I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Gianyar

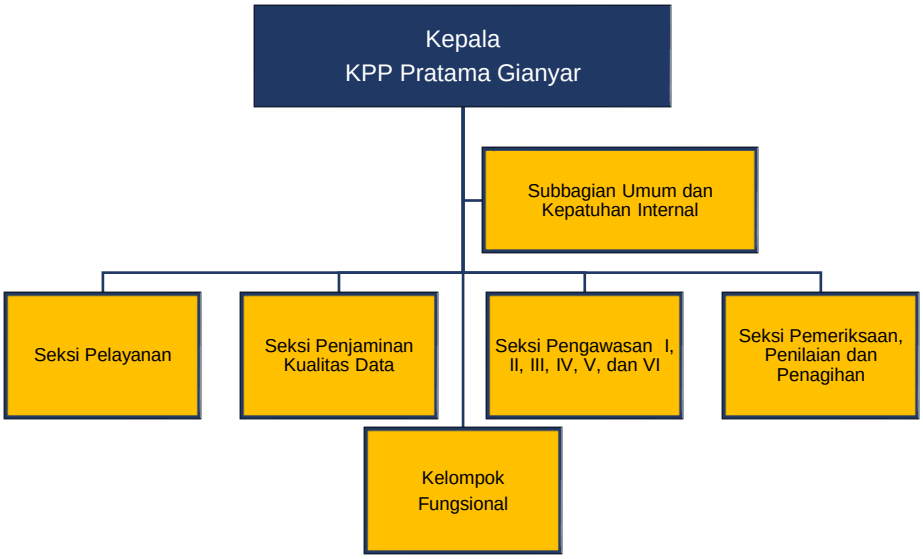

Pegawai KPP Pratama Gianyar berjumlah 96 orang. Adapun rincian dari jumlah pegawai di KPP Pratama Gianyar adalah sebagai berikut.

1. Kepala Kantor: 1 orang
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : 10 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Subbagian, 1 orang Bendaharawan, 1 orang Sekretaris, dan 7 orang Pelaksana)
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data: 5 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 2 orang Pelaksana Administrator Sistem, dan 2 orang Pelaksana)
4. Seksi Pelayanan: 19 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 2 orang Penyuluh Pajak, 3 orang Asisten Penyuluh Pajak dan 13 orang Pelaksana)
5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan: 9 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 2 orang Juru Sita, dan 6 orang Pelaksana)

6. Seksi Pengawasan I: 7 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 5 orang Account Representative, dan 1 orang Pelaksana)
7. Seksi Pengawasan II: 7 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 5 orang Account Representative, dan 1 orang Pelaksana)
8. Seksi Pengawasan III: 6 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 5 orang Account Representative)
9. Seksi Pengawasan IV: 5 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang Account Representative)
10. Seksi Pengawasan V: 6 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 5 orang Account Representative)
11. Seksi Pengawasan VI: 7 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 5 orang Account Representative dan 1 orang Pelaksana)
12. Kelompok Jabatan Fungsional: 14 orang (terdiri dari 2 orang Supervisor, dan 12 orang Fungsional Pemeriksa Pajak)

Gambar I.2 Struktur Organisasi KP2KP Ubud

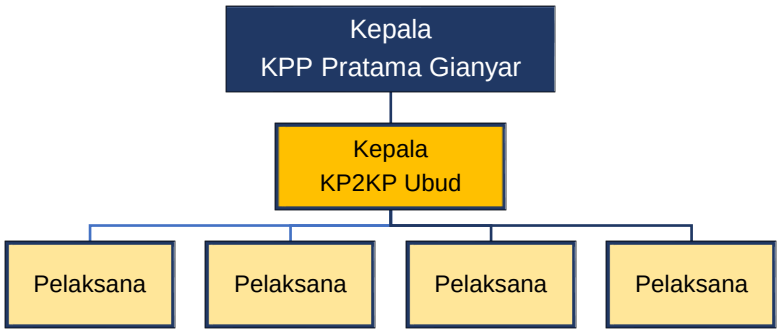

Pegawai KP2KP Ubud berjumlah 5 orang dengan kepala kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Gianyar. Adapun rincian dari jumlah pegawai di KP2KP Ubud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor : 1 orang
2. Pelaksana : 4 orang

Gambar I.3 Struktur Organisasi KP2KP Amlapura

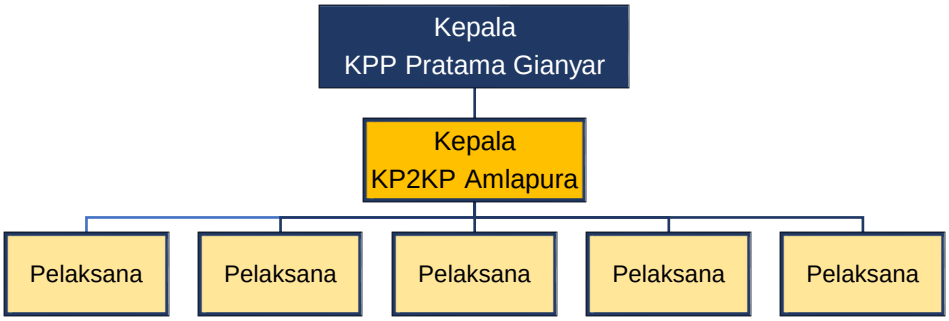

Peg awai KP2KP Amlapura berjumlah 7 orang dengan kepala kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Gianyar. Adapun rincian dari jumlah pegawai di KP2KP Amlapura adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor : 1 orang
2. Pelaksana : 5 orang

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan penganaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data dan internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. pengatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor;

I.3 Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan kinerja serta untuk mempermudah KPP Pratama Gianyar dalam penyajian laporan kinerja, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut.

1. Pendahuluan

   Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Perencanaan Kinerja

   Perencanaan kinerja menyajikan perencanaan strategis yaitu amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan perjanjian kinerja tahun 2024.
3. Akuntabilitas Kinerja

   Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024, serta program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut)
4. Penutup

   Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran
   a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
   b. Nilai Kinerja dan Risiko Organisasi Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi. Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan”, untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Visi Direktorat Jenderal Pajak juga mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai misi (1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan (3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tusi DJP antara lain :

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB

   Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*)

   DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi.

II.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2024 KPP Pratama Gianyar berpedoman pada visi dan misi DJP, amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024, dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi DJP Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

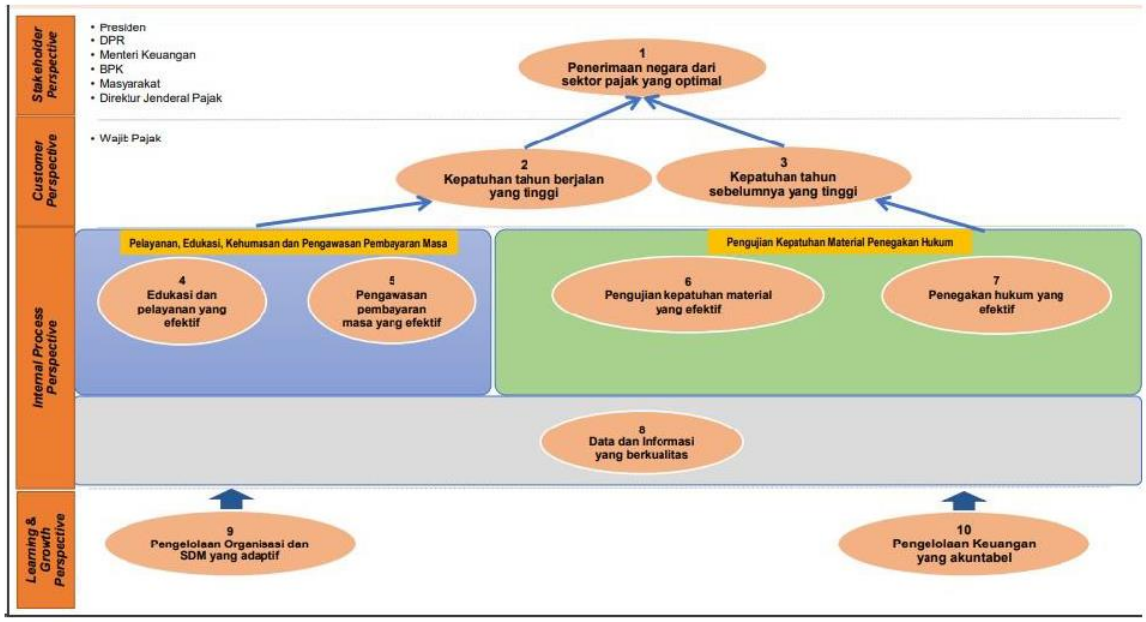

dari peta tersebut, DJP memiliki 10 sasaran strategis (SS) dan dijabarkan menjadi 20 indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar nomor PK-17/WPJ.17/2024. Pada perjanjian kinerja tahun 2024, terdapat beberapa penyesuaian IKU, sebagai berikut

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%

3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100%
7	Penegakan hukum Yang efektif		
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	80%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100
09a1-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	77%	
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100
10b-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	90%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

1. SS Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

1.1 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Capaian atau realisasi penerimaan pajak neto tahun 2024 adalah sebesar Rp1.363.922.728.578 (100,04%) dari target sebesar Rp1.363.337.502.000. Realisasi ini mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 38,94%. Data yang digunakan bersumber dari aplikasi Appportal menu Kinerja Penerimaan. Dalam perjalanannya, KPP Pratama Gianyar menemukan beberapa isu utama dan implikasinya terhadap capaian ini, sebagai berikut.

a. Terdapat pemberitaan yang masif terhadap oknum pegawai DJP yang tidak sesuai dengan kode etik menyebabkan sentimen negatif di masyarakat yang menyebabkan citra DJP menjadi tidak baik sehingga memengaruhi kesadaran masyarakan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya baik itu pelaporan maupun pembayaran pajak.
b. Pariwisata mulai bangkit sejak covid19 menjadi endemi. Hal ini mendorong peningkatan penerimaan dari Wajib Pajak yang bergerak atau bersentuhan dengan kegiatan pariwisata

Terhadap isu tersebut, upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target penerimaan :

a. Melakukan pengawasan pembayaran Masa;
b. Menerbitkan STP;
c. Menerbitkan imbauan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, PPN dan pajak lainnya kepada WP yang pembayaran tidak teratur dan melakukan klarifikasi/konfirmasi secara langsung kepada WP (via telepon atau visit);
d. Menerbitkan Teguran SPT Masa;

e. Menindaklanjuti data tertentu (data potensial yang diterima KPP) dan data internal KPP;
f. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka rekonsiliasi penyetoran pajak pusat dan prognosa pembayaran pajak;
g. Menerbitkan LHPT/KKPT dan SP2DK secara komperehensif dengan prioritas WP yang tidak terdampak pandemi covid-19, memiliki kolektabilitas tinggi, CRM tinggi, terdapat Data Pemicu/Penguji, dan sesuai ATP.

Penerimaan pajak nasional tahun 2024 mampu melampaui target Perpres-76 tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100,5%. Terhadap target penerimaan pajak secara nasional yang telah diturunkan ke masing-masing satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Gianyar telah merealisasikan sebesar 100,04% dari target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan, berikut rencana aksi yang disusun agar bisa mencapai target selanjutnya:

a. Melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak untuk mengamankan Voluntary Payment;
b. Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja pengawasan;
c. Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan Pelaporan SPT;
d. Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan visit, KPDL, pengamatan dan penyisiran objek pajak potensial;
e. Penerbitan SP2DK, ditindaklanjuti dengan klarifikasi/ konfirmasi secara langsung kepada WP (via telepon atau visit);
f. Mengidentifikasi Wajib Pajak yang kegiatan usahanya masih berjalan normal, menurun, dan tutup;
g. Mengoptimalkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang kegiatan usahanya masih berjalan; dan
h. Memanfaatkan data pemicu, data penguji, DSAB, DSPb, dan LHA Kanwil/Kapus serta DSE dalam rangka focussing pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

1.2 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 105. Nilai ini diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dengan

bobot komponen sebesar 50%, serta (2) indeks deviasi akurasi perencanaan kas dengan bobot komponen sebesar 50%. Berikut realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024:

Gambar III.1 Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

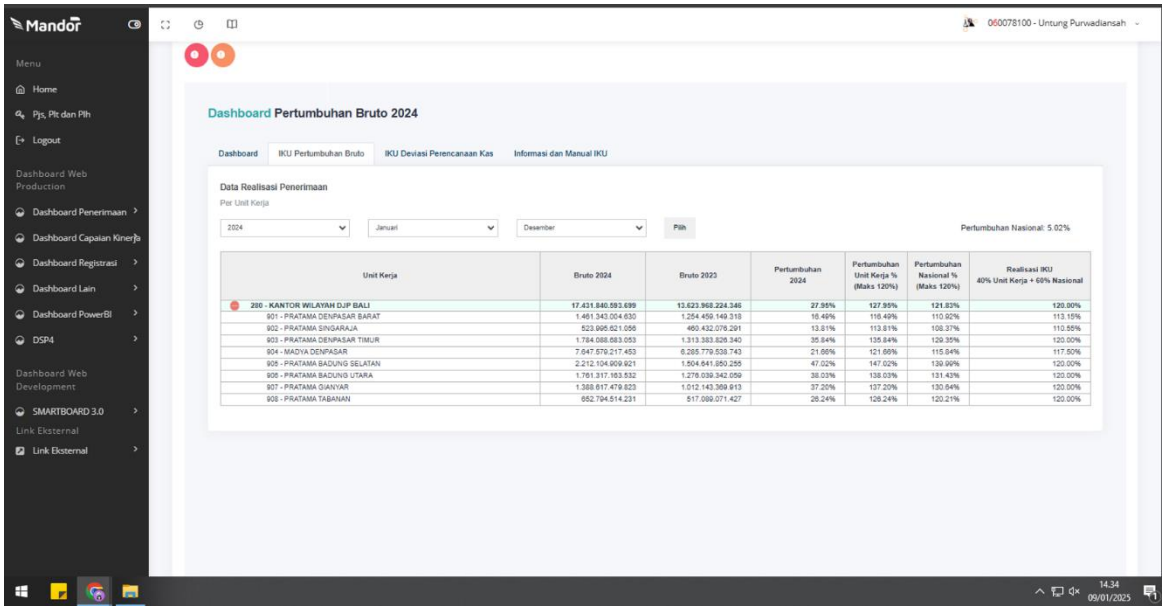

Gambar III.2 Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

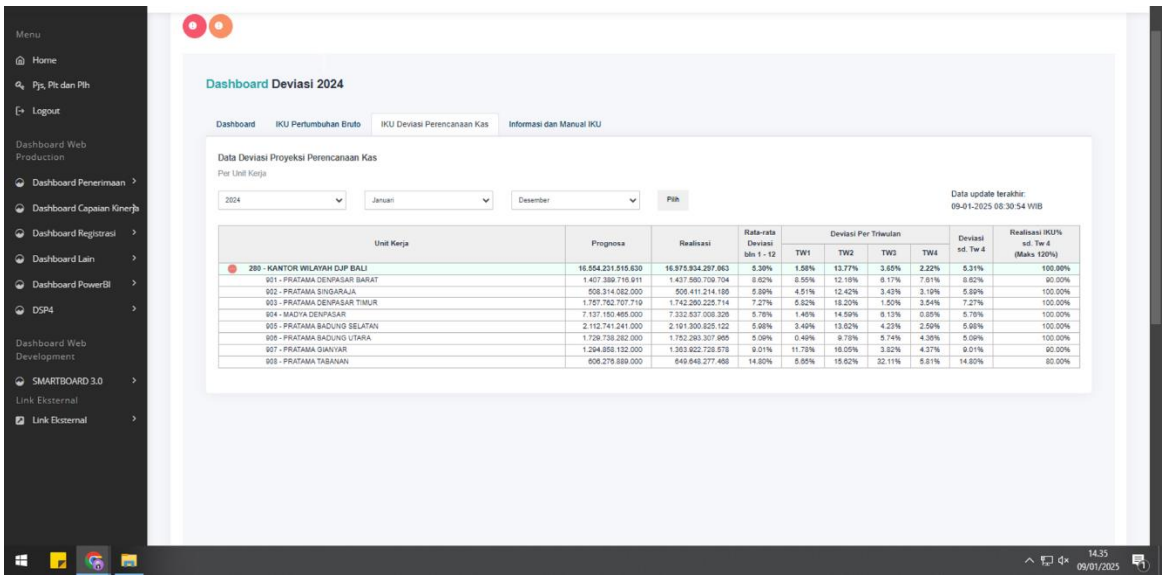

Realisasi pertumbuhan bruto tahun 2024 adalah 120% sedangkan realisasi deviasi perencanaan kas adalah sebesar 90% sehingga realisasi IKU ini adalah 105%. Beberapa isu utama yang diangkat berkaitan dengan realisasi target kinerja ini adalah

a. IKU ini merupakan IKU baru pada KPP

b. Pada Juni 2022 ada pembayaran yang bersumber dari Program Pengurangan Sanksi (PPS) sedangkan tahun 2023 tidak ada begitupun pada 2024

Upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target yaitu membuat konsep Nota Dinas Nomor ND-350/KPP.1707/2024 terkait permintaan prognosa bulanan setiap bulan kepada seksi pengawasan, seksi pemeriksaan penilaian dan penagihan terkait dengan proyeksi pencairan wajib pajak baik dari kegiatan pengawasan pemeriksaan penagihan penilaian dan lain lain dan seksi pelayanan terkait dengan proyeksi restitusi.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Menghitung prognosa penerimaan, baik PPM maupun PKM untuk tanggal 14 s.d.31 setiap bulannya (Seksi Pengawasan dan Seksi P3);
b. Menghitung prognosa restitusi pada tanggal 14 s.d.31 setiap bulannya (Seksi P3 dan Pelayanan);
c. Memperkirakan penerimaan NPWP 000000000-907000 (Seksi PKD);
d. Agar mendapatkan proyeksi yang akurat, perlu untuk memperhatikan tren pertumbuhan setiap bulan, pembayaran rutin/non rutin, proyek pembangunan, dll.

2. SS Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

2.1 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Capaian jumlah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar Rp1.248.390.566.531 (99,93%) dari target sebesar Rp1.249.270.000.000. Isu utama yang ditemukan berkaitan dengan IKU ini adalah

a. Indikator Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu STP, DSE, dan data matching;
b. Dafnom jumlah STP yang seharusnya diterbitkan, Target DSE belum diturunkan, dan Dafnom jumlah data matching tertentu, menunggu diturunkan dari Kanwil
c. Terdapat pemberitaan yang masif terhadap oknum pegawai DJP yang tidak sesuai dengan kode etik menyebabkan sentimen negatif di masyarakat yang menyebabkan citra DJP menjadi tidak baik sehingga memengaruhi kesadaran masyarakan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya baik itu pelaporan maupun pembayaran pajak

d. Pariwisata mulai bangkit sejak covid19 menjadi endemi. Hal ini mendorong peningkatan penerimaan dari Wajib Pajak yang bergerak atau bersentuhan dengan kegiatan pariwisata

Atas isu tersebut di atas, berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan Pelaporan SPT;
b. Menindaklanjuti Data Pemicu dengan prioritas tahun berjalan;
c. Melakukan pengawasan pembayaran PPN pemungut terutama WP yang bertransaksi dengan BUMN;
d. Menerbitkan imbauan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, PPN dan pajak lainnya kepada WP yang pembayaran tidak teratur dan melakukan klarifikasi/konfirmasi secara langsung kepada WP (via telepon atau visit); dan
e. Pengawasan atas kegiatan membangun pada kawasan pariwisata yang terindikasi terutang PPN KMS.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Menunggu diterbitkannya dafnom oleh Kanwil;
b. Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan Pelaporan SPT;
c. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan;
d. Melanjutkan pengawasan pembayaran PPN pemungut.

2.2 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 adalah sebesar 108,28%. Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 sebesar 111.754 dari target sebesar 90.509.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Melakukan kegiatan pelayanan SPT Tahunan di kantor desa dan kecamatan;
b. Membuat tim satuan tugas penerimaan SPT Tahunan;
c. AR mencetak Surat Teguran sehingga banyak WP yang datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;
d. Melakukan blast menggunakan WhatsApp dan juga menelpon untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai pelaporan SPT Tahunan.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Membuka lebih banyak layanan SPT Tahunan di luar kantor;
b. Tetap melakukan blast menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai pelaporan SPT Tahunan.

3. SS Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

3.1 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Capaian jumlah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar Rp 115.524.302.027 (101.27%) dari target Rp 114.070.000.000. Dalam perjalanannya, KPP Pratama menemukan beberapa masalah, seperti

a. Potensi SP2DK DPP tidak semuanya menghasilkan potensi yang material;
b. SP2DK terlambat diterima WP;
c. WP mengangsur pajak yang kurang dibayar

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak yang telah ditetapkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan;
b. Menindaklanjuti SP2DK outstanding dengan data dan potensi yang potensial dan SP2DK DPP yang belum terealisasi;
c. Menghubungi WP terkait adanya SP2DK yang dikirim, kepada WP yang tidak respon dalam jangka waktu 14 hari;
d. Melakukan kunjungan dalam rangka P4DK.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Adjusment DPP Kolaboratif diberikan waktu yang leih lama, sehingga WP dapat diteliti lebih dalam;
b. Mempercepat penerbitan SP2DK WP DPP;
c. Pengusulan Pemeriksaan bagi WP dengan SP2DK potensial, yang tidak memberikan klarifikasi, atau WP tidak mengakui data dalam SP2DK tanpa dokumen/bukti yang relevan;
d. Memaksimalkan program kolabarasi penegakan hukum dengan Penyidik di Kanwil DJP Bali.

4. SS Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

4.1 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

Selama tahun 2024, Tim Penyuluh Perpajakan KPP Pratama Gianyar serta KP2KP telah melaksanakan banyak kegiatan penyuluhan dengan target kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024 sebesar 48 kegiatan dan terealisasi sampai dengan semester 4 sebesar 96 kegiatan dan dari kegiatan tersebut berdasarkan data pada aplikasi mandor, beberapa wajib pajak telah menunjukkan perubahan perilaku yang ditunjukkan dengan adanya pembayaran dan/atau pelaporan bagi Wajib Pajak terdaftar yang belum pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sebelumnya. Peningkatan yang terjadi di tahun ini dikarenakan sudah mulai dilakukan penyuluhan secara tatap muka dan sebagian dilaksanakan secara *webinar*.

Gambar III.3 Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar

Data Unit Kerja

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	280	KANTOR WILAYAH DJP BALI	100.00 %	18.50 %	97.88 %	28.12 %	81.50 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	901	PRATAMA DENPASAR BARAT	100.00 %	18.50 %	65.45 %	28.12 %	60.91 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	902	PRATAMA SINGARAJA	100.00 %	18.50 %	107.27 %	28.12 %	46.36 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	72.49 %	120.00 %	120.00 %
	903	PRATAMA DENPASAR TIMUR	100.00 %	18.50 %	111.61 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	904	MADYA DENPASAR	100.00 %	18.50 %	106.67 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	905	PRATAMA BADUNG SELATAN	100.00 %	18.50 %	73.33 %	28.12 %	110.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	906	PRATAMA BADUNG UTARA	100.00 %	18.50 %	88.89 %	28.12 %	100.51 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	907	PRATAMA GIANYAR	100.00 %	18.50 %	109.02 %	28.12 %	53.76 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	908	PRATAMA TABANAN	100.00 %	18.50 %	115.34 %	28.12 %	78.31 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Penyuluhan dilakukan secara rutin setiap bulan;
b. Melakukan penyuluhan secara langsung ke lokasi wajib pajak khusu wajib pajak DSPT;
c. Mengundang Wajib Pajak khusus yang terkena aturan terbaru di bidang pajak untuk dilakukan sosialisasi;
d. Melakukan sosialisasi secara online melalalui social media dan podcast.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Melakukan kegiatan penyuluhan dimulai di awal tahun disaat beban kerja PAP belum banyak;
b. Aktif dalam melakukan penyuluhan secara online melalui sosial media kantor;
c. Melakukan pembagian tugas tim dalam rangka melalukan perencanan dan penginputan laporan di sisuluh.

4.2 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Indeks capaian tingkat efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan tahun 2024 dihitung per triwulan, nilai indeks setiap triwulan berada di atas target yang dietapkan yaitu 78. Pencapaian Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2024 dilakukan melalui wawancara terekam dengan menggunakan media online seperti *ZoomMeetings, WhatsApp Call/Video* atau aplikasi sejenis atau melalui telepon dan juga melalui wawancara langsung. Adapun aspek yang dinilai terdiri dari 2 aspek, yaitu Layanan Tatap Muka Langsung dan Layanan via Saluran Lain (telepon,whatsapp,email,surat menyurat,dll). Atas perolehan ini KPP Pratama Gianyar akan senantiasa melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Penyuluhan dilakukan secara rutin setiap bulan;
b. Melakukan penyuluhan secara langsung ke lokasi wajib pajak khusu wajib pajak DSPT;
c. Mengundang Wajib Pajak khusus yang terkena aturan terbaru di bidang pajak untuk dilakukan sosialisasi; dan
d. Melakukan sosialisasi secara online melalalui social media dan podcast

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Melakukan kegiatan penyuluhan dimulai di awal tahun disaat beban kerja PAP belum banyak;
b. Aktif dalam melakukan penyuluhan secara online melalui social media kantor;

c. Melakukan pembagian tugas tim dalam rangka melalukan perencanan dan penginputan laporan di sisuluh.

5. SS Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif

5.1 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Capaian persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 adalah 118.75% dari target 90%, sehingga indeks capaian akhir tahun sebesar 120%. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan dan Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching).

Gambar III.4 Persentase Realisasi IKU PPM

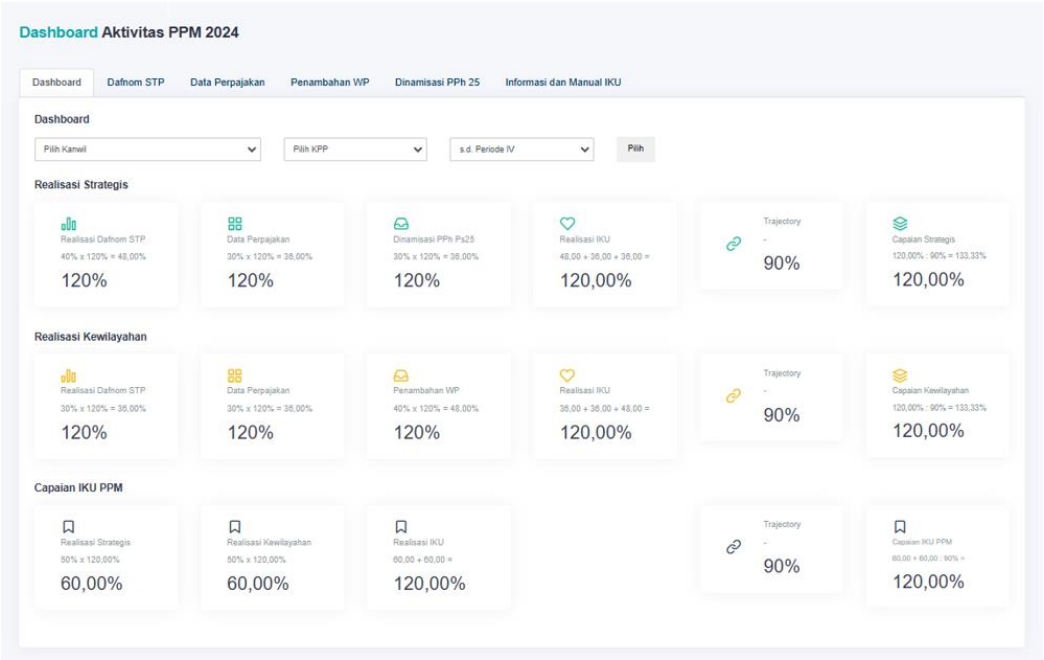

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan Pelaporan SPT;
b. Menerbitkan LHPT dan Surat Pemberitahuan untuk WP yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25; dan
c. Menindaklanjuti Data Pemicu tahun 2023 sebagai tindaklanjut data matching.
d. Menerbitkan Teguran SPT Masa;
e. Melakukan Kunjungan WP DSE yang belum respon dan yang sudah respon namun belum juga mendaftar NPWP

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Menindaklanjuti Dafnom pada aplikasi DSTP di Approweb dan selain dafnom antara lain: STP Angsuran PPh 25 yang tidak setor, STP PPh Final PP23/55;
b. Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan Pelaporan SPT;
c. Menindaklanjuti imbauan dinamisasi agar WP segera menaikkan angsuran PPh 25 mulai masa September 2024.

6. SS Pengujian Kepatuhan Material Yang Efektif

6.1 6a-CP Presentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua kegiatan yaitu Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis dan Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Realisasi P4DK Wajib Pajak strategis sebesar 120% yang didapat dari realisasi capaian penelitian sebesar 120% dan realisasi capaian tindaklanjut sebesar 120%. Realisasi capaian penelitian Wajib Pajak Strategis terdiri dari bobot LHPt sebesar 209 dari target 100 LHPt, sedangkan realisasi capaian tindaklanjut terdiri dari DPP dengan bobot LHP2DK DPP sebesar 160.75 dan SP2DK Outstanding dengan bobot 20.45 dari target 100 LHP2DK. Realisasi P4DK Wajib Pajak kewilayahan sebesar 120% yang didapat dari realisasi capaian kuantitas sebesar 120% dan realisasi capaian kualitas sebesar 150,33%. Capaian kuantitas Wajib Pajak kewilayahan terdiri dari realisasi LHP2DK dari DPP sebesar 844.40 dari target 642.20, realisasi LHP2DK dari outstanding sebesar 215.20 dari target 92.70. Capaian kualitas terdiri dari Bobot realisasi LHP2DK sebesar 1104.75 dari target sebesar 734.90. Dari jumlah kedua realisasi tersebut

maka, realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120% dari target 100%.

Gambar III.5 Realisasi P4DK Strategis

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 | Pilih | Download Data LHPT | Download Data LHP2DK

Tanggal Penarikan Data (ETL): 02 Januari 2025, 20:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH): 03 Januari 2025, 08:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
280. KANTOR WILAYAH DJP BALI	1.292,00	2.181,40	120,00%	1.292,00	1.909,10	156	141,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
901 PRATAMA DENPASAR BARAT	100,00	166,00	120,00%	100,00	161,55	21	20,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
902 PRATAMA SINGARAJA	100,00	171,80	120,00%	100,00	148,05	1	0,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
903 PRATAMA DENPASAR TIMUR	100,00	190,60	120,00%	100,00	174,10	34	28,40	120,00%	120,00%	100%	120,00%
904 MADYA DENPASAR	532,00	832,00	120,00%	532,00	747,35	37	31,90	120,00%	120,00%	100%	120,00%
905 PRATAMA BADUNG SELATAN	120,00	160,00	120,00%	120,00	104,75	32	30,85	113,00%	115,80%	100%	115,80%
906 PRATAMA BADUNG UTARA	140,00	199,00	120,00%	140,00	194,15	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
907 PRATAMA GIANYAR	100,00	209,00	120,00%	100,00	160,75	22	20,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%
908 PRATAMA TABANAN	100,00	253,00	120,00%	100,00	218,40	9	8,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.024,30	120,00%	62.410,00	84.710,90	16.837	12.348,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%

Gambar III.6 Realisasi P4DK Kewilayahan

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 | Pilih | Download Data LHP2DK

Tanggal Penarikan Data (ETL): 02 Januari 2025, 20:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH): 03 Januari 2025, 08:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas	
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi					
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k
280. KANTOR WILAYAH DJP BALI	3.305,25	4.456,60	134,83%	436,90	1.215,40	278,19%	120,00%	3.742,15	5.719,10	152,83%	139,70%
901 PRATAMA DENPASAR BARAT	536,90	775,40	144,42%	47,70	198,80	416,77%	120,00%	584,60	946,45	161,90%	145,14%
902 PRATAMA SINGARAJA	343,85	438,40	126,92%	7,60	13,80	181,58%	120,00%	351,45	428,70	121,98%	121,19%
903 PRATAMA DENPASAR TIMUR	332,80	431,40	129,63%	56,70	177,20	312,52%	120,00%	389,50	573,45	147,23%	136,34%
905 PRATAMA BADUNG SELATAN	459,55	589,80	128,34%	145,80	414,40	284,22%	120,00%	605,35	1.130,45	186,74%	160,05%
906 PRATAMA BADUNG UTARA	597,35	846,20	141,66%	39,60	84,00	212,12%	120,00%	636,95	900,95	141,45%	132,87%
907 PRATAMA GIANYAR	642,20	844,40	131,49%	92,70	215,20	232,15%	120,00%	734,90	1.104,75	150,33%	138,20%
908 PRATAMA TABANAN	392,60	542,00	138,05%	46,80	112,00	239,32%	120,00%	439,40	634,35	144,37%	134,62%
NASIONAL	178.270,95	220.989,00	123,96%	22.926,50	46.477,20	202,72%	120,00%	201.197,45	257.215,65	127,84%	124,71%

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Meningkatkan intensitas komunikasi melalui telepon atau aplikasi pesan online pada WP yang sedang dalam pengawasan;
b. Meningkatkan jumlah WP yang dilakukan pengawasan secara mendalam sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ.2022;
c. Membuat komitmen pembayaran bagi WP yang siap bayar, namun belum memiliki kemampuan bayar saat ini;
d. Memanfaatkan program kolaborasi penegakan hukum dengan Penyidik Kanwil DJP Bali untuk merealisasikan SP2DK;
e. Menindaklanjuti SP2DK outstanding dengan data dan potensi yang potensial;

f. Melakukan usulan pemeriksaan atas SP2DK yang tidak direspon WP maupun yang direspon akan tetapi tidak sesuai dengan SP2DK.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Memanfaatkan data pemicu, data penguji, LHA Kanwil/Kapus serta DSP4 secara intensif;
b. Melakukan visit atas SP2DK tidak respon dan WP tidak bisa dihubungi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
c. Melakukan tindakan lebih persuasif, membuat komitmen pembayaran, dan menyarankan WP ikut insentif apabila memenuhi.

6.2 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Pemanfaatan data selain tahun berjalan ini berdasarkan data pemanfaatan data PKM yang terdiri atas pemanfaatan data STP dan data matching. Atas target penerbitan STP sebesar 538 telah terealisasi sebanyak 1.041 dan atas target data matching sebanyak 245, data yang telah ditindaklanjuti oleh AR dan WP bertotal 289 sehingga untuk persentase capaian pemanfaatan data ini sebesar 120%.

Gambar III.7 Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

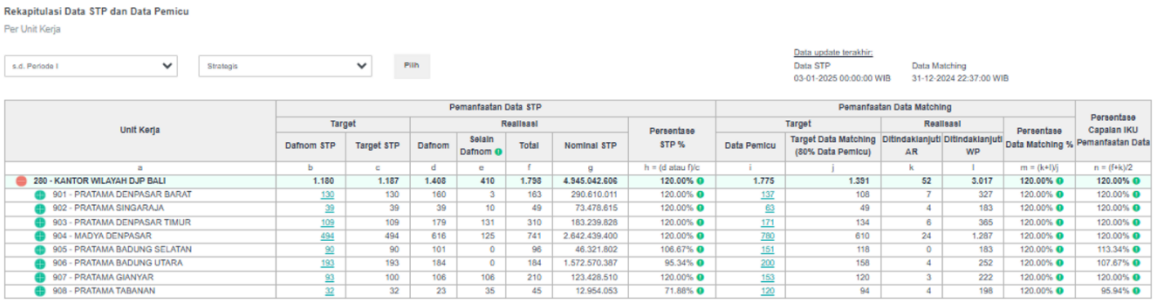

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

s.d. Periode I | Strategis | Pilih

Data update terakhir:
Data STP 03-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+k)/2
280 - KANTOR WILAYAH DJP BALI	1.180	1.187	1.408	410	1.798	4.945.042.606	120.00%	1.775	1.391	52	3.017	120.00%	120.00%
901 - PRATAMA DENPASAR BARAT	130	130	160	3	163	290.610.011	120.00%	137	108	7	327	120.00%	120.00%
902 - PRATAMA SINGARAJA	39	39	39	10	49	73.478.615	120.00%	63	49	4	183	120.00%	120.00%
903 - PRATAMA DENPASAR TIMUR	109	109	179	131	310	183.239.828	120.00%	171	134	6	365	120.00%	120.00%
904 - MADYA DENPASAR	494	494	616	125	741	2.642.439.400	120.00%	780	610	24	1.287	120.00%	120.00%
905 - PRATAMA BADUNG SELATAN	90	90	101	0	98	46.321.802	108.67%	151	118	0	183	120.00%	113.34%
906 - PRATAMA BADUNG UTARA	193	193	184	0	184	1.572.570.387	95.34%	200	158	4	252	120.00%	107.67%
907 - PRATAMA GIANYAR	93	100	106	106	210	123.428.510	120.00%	153	120	3	222	120.00%	120.00%
908 - PRATAMA TABANAN	32	32	23	35	45	12.954.053	71.88%	120	94	4	198	120.00%	95.94%

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Memilih WP dengan data pemicu dimasukan ke dalam DPP;
b. Data yang tidak valid dilakukan pengiriman email ke Kantor Pusat;
c. Data tidak potensial dilakukan penerbitan imbauan;
d. Penerbitan STP sebelum tahun berjalan dengan nilai potensial pada dafnom D-STP.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Melakukan deteksi awal atas WP dengan data pemicu sehingga atas data pemicu tersebut bisa ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK atau imbauan;

b. Menindaklajuti seluruh dafnom STP sebelum tahun berjalan pada aplikasi Approweb dan Pembetulan SPT dampak SP2DK yang tidak masuk dafnom.

6.3 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Dalam menghitung tingkat efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP didasari atas tiga komponen utama yaitu Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) tepat waktu, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, dan persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan. Realisasi atas tiga komponen tersebut di KPP Pratama Gianyar telah melampaui target yang ditetapkan sehingga capaian IKU ini bernilai 120%. Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Gianyar menemukan beberapa permasalahan, diantaranya

a. Waktu diturunkannya DPP Rekomendasi sampai dengan batas waktu pembahasan komite kepatuhan terlalu singkat, sehingga AR tidak cukup waktu untuk melakukan penelitian terhadap DPP rekomendasi tersebut;
b. Potensi yang diturunkan di DPP DSP4 kolaboratif tidak sesuai dengan sumber datanya. Contoh data yang turun adalah WP Pom Bensin yang sudah dipotong PPh Final;
c. Sinkronisasi assign wp antara aplikasi ECTag dan aplikasi aproweb yang lama Yang Menyebabkan AR tidak dapat melakukan adjusment DPP kolaboratif dan penambahan DPP mandiri sampai dengan batas waktu penetapan DPP di KPP;
d. Minimnya data dan informasi sehingga beberapa WP DSPC tidak dapat dihubungi;
e. Terdapat potensi yang diturunkan di DSPE tidak sesuai dengan sumber datanya. Contoh data perlintasan calon WP;
f. WP tidak koperatif sehingga walaupun telah dilakukan edukasi, namun perubahan perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan.

Dalam mengatasi permasalahan di atas, berikut upaya-upaya yang dilaksanakan agar dapat mencapai target

a. Mengajukan DPP per sektor usaha untuk diterbitkan SP2DK dan LHP2DK tiap semester
b. Melakukan Himbauan Terhadap WP OP yang Belum Melaporkan SPT Tahunan Tahun 2023

c. Melakukan Pengawasan pebayaran dan pelaporan SPT masa bagi WP PKP

Gambar III.8 Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan KKWP

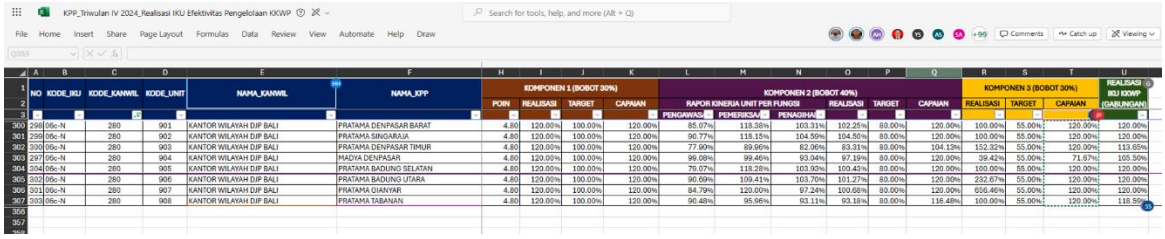

NO	KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)								KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
						POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN			REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
										PENGAWAS	PEMERIKSA	PENAGIHAN									
300	298	06c-N	280	901	KANTOR WILAYAH DJP BALI	PRATAMA DENPASAR BARAT	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.07%	118.38%	103.31%	102.25%	80.00%	120.00%	100.00%	55.00%	120.00%	120.00%
301	299	06c-N	280	902	KANTOR WILAYAH DJP BALI	PRATAMA SINGARAJA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	90.77%	118.15%	104.56%	104.56%	80.00%	120.00%	100.00%	55.00%	120.00%	120.00%
302	300	06c-N	280	903	KANTOR WILAYAH DJP BALI	PRATAMA DENPASAR TIMUR	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	77.90%	89.96%	82.06%	83.31%	80.00%	104.13%	152.32%	55.00%	120.00%	113.65%
303	297	06c-N	280	904	KANTOR WILAYAH DJP BALI	MADYA DENPASAR	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	99.08%	99.46%	93.04%	97.19%	80.00%	120.00%	39.42%	55.00%	71.67%	105.50%
304	304	06c-N	280	905	KANTOR WILAYAH DJP BALI	PRATAMA BADUNG SELATAN	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	75.07%	118.28%	103.90%	100.43%	80.00%	120.00%	100.00%	55.00%	120.00%	120.00%
305	302	06c-N	280	906	KANTOR WILAYAH DJP BALI	PRATAMA BADUNG UTARA	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	90.69%	109.41%	103.70%	101.27%	80.00%	120.00%	232.67%	55.00%	120.00%	120.00%
306	301	06c-N	280	907	KANTOR WILAYAH DJP BALI	PRATAMA GIANYAR	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.79%	120.00%	97.24%	100.68%	80.00%	120.00%	656.46%	55.00%	120.00%	120.00%
307	303	06c-N	280	908	KANTOR WILAYAH DJP BALI	PRATAMA TABANAN	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	90.48%	95.96%	93.11%	93.18%	80.00%	116.48%	100.00%	55.00%	120.00%	118.58%

7. SS Penegakan Hukum yang Efektif

7.1 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui lima variabel dan pembobotan dari kegiatan persentase nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit tahun berjalan dibandingkan nilai data potensi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) berdasarkan SE-15/PJ/2018 atau SE-07/PJ/2020, persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Selama tahun 2024, Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP memperoleh capaian 120% dengan total bobot 94,01%, Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan memperoleh capaian 107,13% dengan bobot 108,93%, Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan memperoleh capaian 120% dengan bobot 114,49%, Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu memperoleh capaian 120% dengan bobot 106,91%, Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi memperoleh capaian 120% dengan bobot 100%, total realisasi IKU sebesar 115,58% dari target 100% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Tingkat Efektivitas Penilaian didasarkan atas persentase penyelesaian penilaian. Perhitungan nilai ini diambil melalui aplikasi Appraisal, berdasarkan data pada aplikasi tersebut, capaian efektivitas penilaian adalah sebesar 120%. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dihitung dengan perbandingan 60% capaian efektivitas pemeriksaan dan 40% capaian efektivitas penilaian, sehingga diperoleh nilai capaian IKU ini adalah 120%.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. FPP sudah membuat usulan pemeriksaan secara mandiri;
b. Sudah dilakukan permintaan data dari pihak ketiga;
c. FPP sudah mengoptimalkan pertemuan Wajib Pajak dengan pemeriksaan lapangan;
d. Mengadakan rapat komite kepatuhan untuk melakukan pembahasan usulan pemeriksaan dan menetapkan DSPP Kolaboratif tahap I, II, III, dan IV serta DSPP RBP Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Akselerasi dan Nonakselerasi.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi usulan pemeriksaan secara berkala;
b. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak secara berkala;
c. Mengoptimalkan data turunan dari kantor pusat sebagai trigger dalam usulan pemeriksaan;

7.2 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Capaian Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 sebesar 117,94% dari target 75%, sehingga indeks capaian akhir tahun sebesar 120%. Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui penjumlahan realisasi pembobotan dari masing-masing tindakan penagihan yang meliputi Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan; dan Pencegahan

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. melakukan Penerbitan Surat Teguran terhadap ketetapan yang telah jatuh tempo penagihan;
b. Menyampaikan Surat Paksa ke alamat Wajib Pajak, Menanyakan kepada AR atau warga lokal, Meningkatkan jumlah frekuensi dinas luar ke lapangan dan memanggil wajib pajak ke kantor melalui telepon;
c. mengirimkan surat tindak lanjut dan menghubungi bank terkait pemblokiran rekening;
d. Membuat Laporan Profiling Wajb Pajak dan Penanggung Pajak dan mengirimkannya ke Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil

e. Melakukan kegiatan persuasif terhadap Wajib Pajak melalui via Whatsapp dan telepon;
f. Menindaklanjuti Wajib Pajak yang masuk DSPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan)

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Membuat daftar nominatif wajib pajak yang mempunyai komitmen untuk melakukan angsuran piutang pajak;dan
b. Optimalisasi Kegiatan Penagihan Aktif

7.3 7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase penyampaian usul pemeriksaan dari bukti permulaan diukur dari jumlah usulan pemeriksaan yang disampaikan sampai dengan bulan November tahun berjalan. Selama tahun 2024, KPP Pratama Gianyar menyampaikan 2 usulan pemeriksaan dari targetnya sebanyak 1 usulan, sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target yaitu melakukan usulan pemeriksaan atas SP2DK yang tidak ditanggapi WP, ditanggapi WP akan tetapi tidak sesuai dengan data yang ada dan yang terindikasi memiliki potensi pajak yang besar akan tetapi kurang maksimal apabila diselesaikan di Seksi Pengawasan. Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target, KPP Pratama Gianyar berusaha memperbanyak SP2DK agar dapat menjadi bahan baku pemeriksaan.

8. SS Data dan Informasi yang Berkualitas

8.1 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung

berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR). Jangka waktu Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, realisasi Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sebesar 1.644 dari target 1.150, sehingga capaian pada tahun ini sebesar 142,96%. Untuk penyelesaian laporan pengamatan, dari target sebanyak 4 laporan, 7 laporan pengamatan telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaiannya sebesar 192,50%. Dari total keduanya, capaian realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu 120% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Data perpajakan telah dikumpulkan untuk direkam di sistem SIDJPNINE;
b. Memonitoring data alket yang telah direkam hingga berstatus selesai;
c. Melakukan pertukaran data dan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait perizinan usaha di tingkat kecamatan dan kabupaten;
d. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Daerah misalnya dengan memberikan apresiasi atas pertukaran data dan informasi yang telah dilakukan;

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Senantiasa mengumpulkan data potensi perpajakan yang akan direkam pada SIDJPNINE;
b. Meningkatkan jumlah data potensi perpajakan yang direkam pada sistem SIDJPNINE;
c. Memonitoring data alket yang telah direkam hingga berstatus selesai;
d. Mengingatkan kepada Seksi yang merekam data agar setelah di rekam dapat di apporove oleh kepala seksi; dan
e. Melakukan kegiatan penyisiran.

8.2 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Persentase penghimpunan data regional ILAP dipengaruhi oleh 2 komponen yaitu jumlah data utama regional dengan bobot 60% dan target sebanyak 23 data, telah disampaikan sebanyak 23 data juga. Komponen yang kedua yaitu jumlah data regional lainnya yang berbobot 40% dengan target 16 data dan sudah sudah tersampaikan sebanyak 16 data. Berdasarkan perhitungan tersebut, persentase penghimpunan data regional ILAP tahun 2024 sebesar 100% dari target 55%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Untuk mengejar IKU ini, upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target yaitu melakukan koordinasi internal dengan account representative dan Fungsional Penyuluh Pajak penanggungjawab masing-masing wilayah untuk menghubungi PIC masing-masing Satker/Dinas per Kabupaten.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Membuat konsep Nota Dinas permintaan data regional ke Pemerintah daerah; dan
b. Melakukan koordinasi internal dengan account representative dan Fungsional Penyuluh Pajak penanggungjawab masing-masing wilayah untuk menghubungi PIC masing-masing Satker/Dinas per Kabupaten.

9. SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

9.1 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari : kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Kualitas kompetensi dan kegiatan kebintalan SDM dinilai berdasarkan empat aspek penilaian yaitu

a. Kualitas Kompetensi Pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajarial dan dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya
b. Kualitas Kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya

c. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai
d. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM berdasarkan data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator

Realisasi komponen I yaitu kompetensi SDM adalah sebesar 114,97% dari target 90% dan realisasi komponen II yaitu pelaksanaan kebintalan adalah sebesar 107% dari target 80% sehingga realiasi IKU sebesar 117,48% dengan indeks capaian IKU sebesar 120%.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Mengikuti Assessment dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang di tentukan;
b. Melakukan Bimbingan Teknis/ FGD/ In House Training/ Sharing Season terhadap kegiatan Assessment dan Uji Kompetensi
c. Mengikuti pembelajaran baik melalui e-learning maupun tatap muka.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target :

a. Melakukan Bimbingan Teknis/ FGD/ In House Training/ Sharing Session terhadap kegiatan Assessment dan Uji Kompetensi

9.2 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

a. pelayanan perpajakan;
b. pengawasan kepatuhan;
c. pemeriksaan pajak;
d. penagihan pajak

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan, Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya, Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak dan Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak

yang dilakukan penagihan pajak. Realisasi IKU ini sebesar 92,85 dari target 85 (dalam skala 100) dengan indeks capaian sebesar 109,23%.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Meningkatkan integritas terhadap pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Meningkatkan integritas terhadap pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak.

9.3 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Formula penghitungan IKU ini terdiri dari persentase implementasi manajemen kinerja ditambah dengan persentase implementasi manajemen risiko, dengan proporsi sama besar antara kedua komponen tersebut. Efektivitas implementasi manajemen kinerja diukur dari dua komponen sebagai berikut.

a. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja

   Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

b. Indeks kualitas pengelolaan kinerja

   Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian.

Sementara itu, Manajemen Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau *Level* Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko.

Target IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2023 adalah sebesar 90%, dengan realisasi IKU sebesar 100% dan indeks capaiannya sebesar 111.11%.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Melaksanakan rapat DKO sebelum tanggal 7 setiap 3 bulan sekali;
b. Menulis pengumuman agar peserta rapat hadir 10 menit sebelum rapat di mulai; dan
c. Berkoordinasi dengan masing-masing seksi terkait data MR dan NKO.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Menulis pengumuman agar peserta hadir 10 menit sebelum rapat dimulai; dan
b. Berkoordinasi dengan masing-masing seksi terkait data MR dan NKO.

10 SS Penguatan Pengelolaan Keuangan Yang Optimal

10.1 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran strategis IKU ini adalah pengelolaan keuangan yang optimal yang berarti bahwa dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU ini mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

a. Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran dinilai dari Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Revisi DIPA dihitung dari perbandingan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang

diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan. Deviasi Halaman III DIPA merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan. Indikator Pagu Minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan.

b. **Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi** dinilai dari indikator Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp 50.000.000 keatas. Pengelolaan UP dan TUP berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Penyampaian LPJ Bendahara dihitung berdasarkan rasio antar LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dispensasi Penyampaian SPM berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM.

c. **Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan** ditentukan dari indikator Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian *Output* (KCO), dan Retur SP2D. Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan. Penyelesaian Tagihan dihitung dari rasio antara

penyampaian SPM LS Kontraktural *Non* Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktural *Non* Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN. Konfirmasi Capaian Output rasionya dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO dihasilkan dari proses input Capaian Output pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dala mekanisme pelaporan pada system informasi yang disediakan oleh DJPb. Retur SP2D dhitung dari rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang diterbitkan KPPN.

d. **Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan** dinilai dari indikator Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas (Renkas). Pengembalian/kesalahan SPM dihitung dari rasio antara pengembalian SPM yang ditolak oleh sistem saat konversi oleh *front office* di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi *middle office* (kesalahan substantif). Renkas dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu sesuai dengna nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

Berikut adalah rincian capaian indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			**Capaian Triwulan IV**		
A	Nilai IKPA		**97,36%**		
			Nilai	Bobot	Nilai Akhir
	1	Pengelolaan UP dan TUP	99,97%	10,00%	9,99%
	2	Halaman III DIPA	100,00%	15,00%	15,00%
	3	Belanja Kontraktual	100,00%	10,00%	10,00%
	4	Penyelesaian Tagihan	100,00%	10,00%	10,00%
	5	Konfirmasi Capaian Output	100,00%	25,00%	25,00%
	6	Penyerapan Anggaran	86,80%	20,00%	17,37%
	7	Revisi DIPA	100,00%	10,00%	10,00%
				100,00%	**97,36%**
B	Nilai SMART (Hanya Triwulan IV)		**100,00%**		
	1	Capaian Rincian Output	100,00%		100,00%
	2	Efisiensi SBK	100,00%		100,00%
	3	Penggunaan SBK	100,00%		100,00%
Realisasi KKPA Triwulan IV 2024			**98,68%**		
Nilai Capaian IKU IKKPA Triwulan IV 2024			**120%**		

Berdasarkan formula penghitungan manual IKU diketahui bahwa realisasi kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Gianyar Tahun Anggaran 2024 mencapai angka 120% dari target 100% sehingga indeks capaian atas kualitas pelaksanaan anggaran adalah 120%.

Berikut adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Gianyar agar bisa mencapai target:

a. Menyampaikan LPJ serta mengisi capaian output tepat waktu;
b. Menyampaikan data kontrak dan pembayaran tagihan tepat waktu;
c. Melakukan revolving Uang Persediaan tepat waktu;
d. Melaksanakan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan;
e. Meneliti kebenaran data supplier dan isian SPM untuk meminimalisasi kesalahan SPM dan retur SP2D.

Rencana Aksi ke depan agar bisa mencapai target:

a. Selalu berkoordinasi antar penanggung jawab pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan karena IKU PKPA juga melibatkan Seksi Terkait lainnya terutama terkait dengan Alokasi Anggaran Kegiatan Tupoksi;
b. Melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pejabat perbendaharaan (KPA, PPSPM, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu, PBJ, staf pengelola keuangan);
c. Mendorong Seksi terkait tupoksi untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tupoksi agar penyerapan anggaran terkait Realisasi Volume dan Pelaksanaan RO Tupoksi tercapai dan Capaian Output tercapai;
d. Meningkatkan strategi pengelolaan anggaran agar khususnya rencana penyerapan pada Indikator RPD hal. III DIPA serta Penyerapan Anggaran agar dapat tercapai;
e. Untuk selanjutnya Strategi Pengelolaan Anggaran dibuat batasan Penyerapan Anggaran kurang lebih 80%-85% untuk meningkatkan nilai Efisiensi;
f. Meminimalisasikan deviasi pada hal. III DIPA dengan cara meningkatkan pengawasan belanja setiap bulan pada setiap Jenis Belanja 51, 52 dan 53.

III.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024, realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Gianyar TA 2024 adalah sebesar Rp10.941.469.337 atau mencapai 98,73% dari pagu belanja sebesar Rp11.081.775.000. Penyerapan DIPA ini mengalami kenaikan karena di tahun anggaran 2024 ini terdapat belanja modal berupa kegiatan konstruksi 3 bangunan yaitu

1. Konstruksi fisik renovasi gedung kantor pos pajak bangli
2. Konstruksi fisik renovasi gedung berkas pajak klungkung
3. Konstruksi fisik renovasi gedung kantor pos pajak klungkung

Seluruh kegiatan KPP dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp767.364.000 (pagu sebesar Rp767.367.000), belanja barang mencapai sebesar Rp6.456.944.650(pagu sebesar Rp6.589.304.000), dan belanja modal sebesar Rp3.717.160.687(pagu sebesar Rp3.725.104.000).

BAB IV
PENUTUP

Kinerja KPP diukur dari melalui perjanjian kinerja yang terdiri dari beberapa indikator kinerja utama. Pada tahun 2024, ini keempat kalinya secara berturut, KPP Pratama Gianyar berhasil melampaui target penerimaan pajak yang diamanahkan, begitupun sama halnya dengan target kinerja lainnya yang berhasil dipenuhi. Realisasi kinerja organisasi tercantum dalam dokumen Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar Tahun 2024 yang mencapai 109,86%. Seluruh IKU KPP Pratama Gianyar Tahun 2024 telah terealisasi melebihi dari yang ditargetkan.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya - upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Gianyar serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk masa yang akan datang, KPP Pratama Gianyar berkomitmen senantiasa memberikan kinerja yang terbaik untuk memenuhi target yang dibebankan pada KPP Pratama Gianyar. KPP Pratama Gianyar percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, DJP akan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semangat untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas KPP Pratama Gianyar di masa yang akan datang.

NILAI KINERJA DAN RISIKO ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP BALI
KPP PRATAMA GIANYAR
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,14
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,14
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19%	42,22%	105,00
	Customer Perspective						20,00%	102,36
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,46
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,93%	Max	E/L	26%	57,78%	99,93
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,28%	Max	P/L	19%	42,22%	108,28
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,27%	Max	E/M	21%	100,00%	101,27
	Internal Process Perspective						25,00%	118,68
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,41
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,81%	Max	E/M	21%	50,00%	106,81
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,47%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	90,69%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	91,67%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,30
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,61
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	92,85	Max	P/M	14%	33,33%	109,23
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,86

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Gianyar, 16 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Abdul Gafur
NIP 19750810 200212 1 001

Administrator Kinerja Organisasi,

Ditandatangani secara elektronik
I Wayan Eka Mahardika
NIP 19740924 199502 1 002

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-17/WPJ.17/2024
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

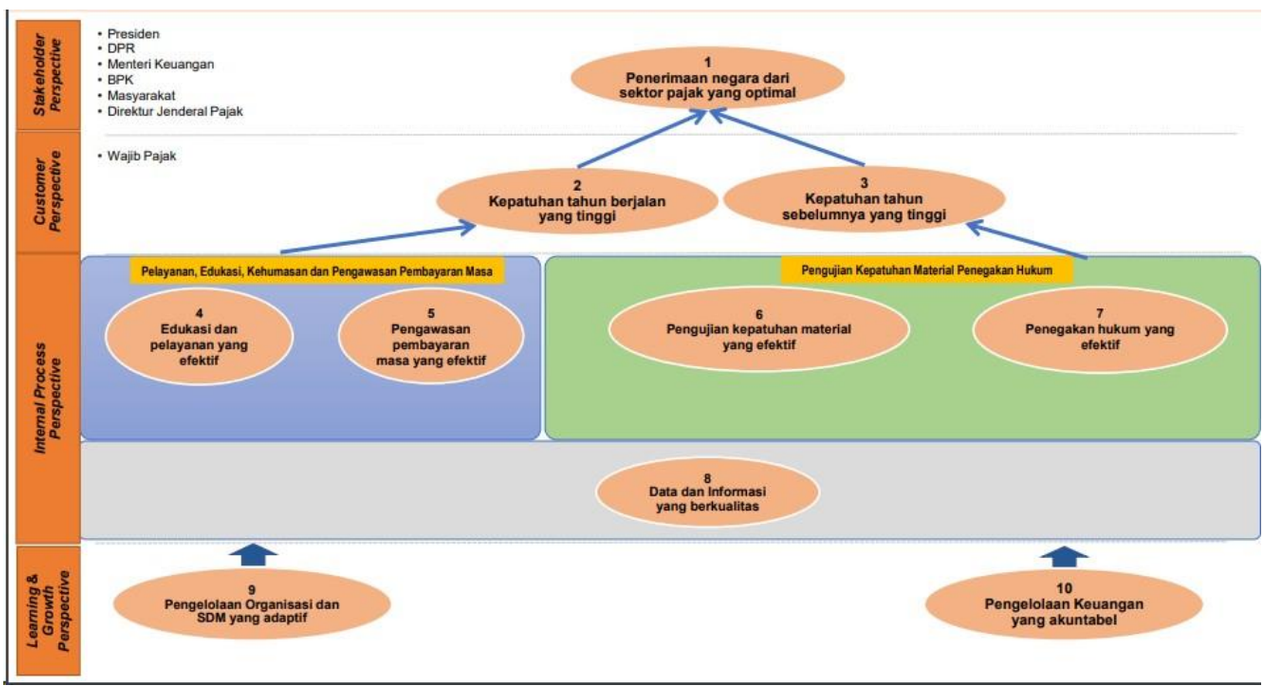

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	*2,807,764,000*
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	1,724,831,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	485,850,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	597,083,000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	*8,408,627,000*
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	7,641,260,000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	767,367,000
Total	**Rp**	**11,216,391,000**

Gianyar, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bali,

Ditandatangani Secara Elektronik
Nurbaeti Munawaroh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar,

Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Gafur

RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Gianyar, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Gianyar,

Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Gafur

INISIATIF STRATEGIS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR
KANTOR WILAYAH DJP BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Efektivitas Penagiihan	Optimalisasi pencairan piutang pajak melalui Tindakan penagihan aktif sehingga meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga menunjang penerimaan negara dari hasil pencairan piutang pajak	Realisasi Tindakan penagihan mencapai target	**Q1:** - Melakukan penagihan aktif dengan cara penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak sebagai peringatan awal kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya - Melakukan penagihan aktif dengan cara pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. **Q2:** - Melakukan penagihan aktif dengan tindakan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) bepergian ke luar negeri sebagai salah satu tindakan penagihan aktif represif **Q3:** - Melakukan pelaksanaan penyitaan dan penjualan barang berdasarkan	**Q1:** - Surat Teguran - LaporanPelaksanaan Surat Paksa **Q2**: - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak **Q3:**	Januari – Maret 2024 April – Juni 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atas harta WP/PP sebagai jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak	- Berita Acara Pelaksanaan Sita dan Risalah Lelang	Juli – September 2024		
				Q4: - Melakukan pemblokiran sebagai suatu upaya pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank.	**Q4:** - Berita Acara Pemblokiran dari Bank Terkait	Oktober – Desember 2024		

Gianyar, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar,

Ditandatangani Secara Elektronik
Abdul Gafur

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Abdul Gafur	NAMA	Nurbaeti Munawaroh
NIP	19750810 200212 1 001	NIP	19720505 199603 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis

7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	

PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Gianyar, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Abdul Gafur

19750810 200212 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Nurbaeti Munawaroh

19720505 199603 2 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	110 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Gianyar, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Abdul Gafur
19750810 200212 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Nurbaeti Munaawaroh
19720505 199603 2 001